

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam, ikhtiar Baru van Houve*, Jakarta, 2002.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakkan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- H.A.M. Efendi, 1985, *Pokok-pokok Hukum Pidana Adat*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1984.
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1982.
- I Made Widiana, *Hukum Pidana adat dalam pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.
- Isnuwardini St. Rajo Alam dan Zainal Syafri Dt. Sampono Labiah, *Adat Istiadat dan Tambo Kurai Limo Jorong Kota Bukittinggi*, 2004.
- Irsal Verry Idrus Dt. Lelo Sampono. *Undang-undang NanDuo Puluah (Hukum Dasar Minangkabau)*. Batusangkar, 2017.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT Alumni, 2015.
- Nilma Suryani, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Paradnya Paramitha, 1967.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia; Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Topo Santoso, *Pluralism Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Ersesco, 1990.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 1983.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil

Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Nagari Pamatang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 Bab IV Pasal 7

Undang-Undang Nan Duo Puluah

C. Jurnal dan Makalah

A Irzal, Rias, “*Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study*”, Academic Research International, Vol. 5 No. 2 ,2014.

A Irzal, Rias, “*Decision Reinforcement of Village Adat Council Institution in Resolving The Disputes Based on Minangkabau Adat Comunity*”, Academic Research International, Vol. 4 No. 6, 2013.

Elwi Danil, *Apresiasi terhadap Hukum Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer” serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke- V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Hotel Onna Muara pada tanggal 1-16 April 2018.

Kesimpulan Seminar *Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional* pada tanggal 17 Januari 1975.

Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer” serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke – V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Hotel Inna Muara Padang, tanggal 1-6 April 2018.

Rahmawati, *Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan antara Kitab Undang-undang Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal An-Nisa’a. Vol. 8, No. 1, 2013.

Sri Ismawati, *Barukupm Adat: Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana pada Masyarakat Dayak Kanayatn dan Kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Jotel Inna Muara Padang tanggal 1-6 April 2018.

D. Internet

JDIH DPRD Bangka Selatan, (14 Desember 2021). “Pengertian Hukum”.

Jurnal Sumbar, (18 Juni 2019). “Nagari Pematang Panjang Sijunjung dinilai Tim Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi”.

Info Publik, (3 Agustus 2018). “Nagari Pematang Panjang Sijunjung dinilai sebagai Nagari Teraman di Sumbar”.

E. Wawancara

Prapenelitian dengan Rio Suzandi, tanggal 12 Februari 2022, di Kantor Wali Nagari.

Penelitian dengan Datuak Gindo Kayo, tanggal 20 April 2022, di Pematang Panjang.

Penelitian dengan Datuak Panghulu Garang, tanggal 14 April 2022, di Kantor Wali Nagari Pematang Panjang.

Penelitian dengan Yorianto, tanggal 20 April 2022, di Kantor Wali Nagari Pematang Panjang.

Penelitian dengan Rio Suzandi, tanggal 20 April, di Kantor Wali Nagari Pematang Panjang.

